



<u>PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PENGEMBANGAN USAHA MIKRO</u>	<u>PDF</u>
<i>- Sukidjo, Teguh Sihono, - Mustofa</i>	<b>1-10</b>
<u>PENGARUH MANAJEMEN LABA RIIL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN ARUS KAS OPERASI</u>	<u>PDF</u>
<i>Herlina Wijayanti, Soni Agus Irwandi, Nurmala Ahmar</i>	<b>11-23</b>
<u>IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA</u>	<u>PDF</u>
<i>- Ismani, Andian Ari Istiningrum, Mahendra Adhi Nugroho, Adeng Pustikaningsih</i>	<b>24-37</b>
<u>ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK FASHION LOKAL DAN IMPOR</u>	<u>PDF</u>
<i>Evelyn Setiawan</i>	<b>38-47</b>
<u>ANALISIS PENGARUH KUALITAS FINANSIAL PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR DAN KUALITAS PEREKONOMIAN TERHADAP OPINI AUDIT (GOING CONCERN)</u>	<u>PDF</u>
<i>Baqarina Hadori, Bambang Sudibyo</i>	<b>48-64</b>
<u>DAMPAK SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR</u>	<u>PDF</u>
<i>Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, Hariadi Kartodihardjo</i>	<b>65-80</b>
<u>PERUBAHAN LIKUIDITAS AKIBAT PEMECAHAN SAHAM: STUDI DI PASAR MODAL INDONESIA</u>	<u>PDF</u>
<i>Muniya Alteza, Lina Nur Hidayati, Arum Darmawati</i>	<b>81-95</b>
<u>KOPERASI MEMBINA WIRAUSAHA BERKARAKTER INDONESIA</u>	<u>PDF</u>
<i>- Sugiharsono</i>	<b>96-104</b>

## DAMPAK SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN WILAYAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR

*Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, & Hariadi Kartodihardjo*

*Institut Pertanian Bogor, Indonesia*

*wahyuhidayat211@gmail.com*

**Abstrak:** Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan sektor pertambangan (pertambangan nonmigas dan penggalian) terhadap perekonomian wilayah dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain di Kabupaten Luwu Timur. Metode yang digunakan adalah metode identifikasi sektor-sektor perekonomian kabupaten luwu timur dan metode RAS. Analisis yang digunakan yaitu Analisis PDRB dan analisis Input-Output (I-O). Sektor pertambangan tanpa migas yang menempati peringkat pertama berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB dan sektor penggalian yang menempati peringkat ke-17 berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB. Hasil analisis I-O, sektor pertambangan memiliki hubungan keterkaitan antar sektor di bawah rata-rata. Nilai IDP dan IDK kurang dari satu menunjukkan sektor pertambangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan sektor hulu dan hilirnya.

**Kata Kunci:** Sektor Pertambangan, Perekonomian Wilayah.

**Abstract:** Mining Sector Impact on the Economy Regional East Luwu Regency. The purposes of this study are to determine the role of the mining sector (non-oil & gas mining and quarrying) to the economy of the region and its linkage with other sectors in East Luwu Regency. The method used is a method of identification of the economic sectors East Luwu Regency and methods of RAS. The GDP analysis and analysis of Input-Output (IO) are employed in this study. Without oil and gas, mining sector is in the first position based on its contribution in the formation of GDP. On the other hand quarrying sector appear in 17th position. The results show that mining sector has inter-sector linkages at below average. The value of Backward Linkage and Forward Linkage is less than one. This indicates that the mining sector has not been able to increase the growth of the upstream and downstream sectors.

**Keywords:** mining sector, regional economy, East Luwu Regency.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang mengenai otonomi daerah akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintahan Daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam me-

rencanakan arah pembangunannya. Di sisi lain, pemerintah daerah akan semakin dituntut untuk lebih mandiri di dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya. Otonomi daerah juga mengisyaratkan semakin pentingnya pendekatan

pembangunan dengan basis pengembangan wilayah dibanding pendekatan pembangunan dengan pendekatan sektoral (Panuju *et al.* 2012). Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu di antara wilayah kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan, yang hasil pemekaran pada tahun 2003. Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah wilayah berpotensi besar dari segi sumber daya alam dan tempat beroperasinya sebuah perusahaan lokal dan multi-nasional yang bergerak di sektor pertambangan (Marakarma 2009)

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai penghasil devisa (KKBP 2011). Menurut Djakapermana (2010) bahwa tingkat perkembangan suatu wilayah dan ukuran keberhasilan pembangunan identik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan perubahan atau peningkatan dalam Produk Domestik Bruto (PDRB). Pada tahun 2011, PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku mencapai 9.6 triliun rupiah. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor dominan dengan kontribusi mencapai 73.56% adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dan kontribusi sektor Pertanian sebesar 15.47% (BPS 2012). Kabupaten Luwu Timur urutan ke dua tingkat PDRB tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar (BAPPEDA 2011). Oleh sebab itu, Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari aspek ekonomi. Menurut Rustiadi *et al.* (2011) bahwa setiap

wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektor dan spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Morrissey dan O'Donoghue bahwa analisis ekonomi wilayah penting dilakukan untuk menyediakan akses bagi pemegang kebijakan terkait dampak sektor ekonomi (Syarif, 2014).

Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari aspek ekonomi karena wilayah ini didukung oleh adanya Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang memposisikan Kabupaten Luwu Timur sebagai pusat pertambangan nikel pada koridor ekonomi Sulawesi. Dalam melaksanakan pembangunan, salah satu masalah yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah masih terbatasnya informasi tentang potensi dan perkembangan ekonomi wilayah itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program-program pembangunan umumnya lebih bersifat politis tanpa didasarkan pada suatu kajian ilmiah. Hubungan antar sektor ekonomi dan tingkat perkembangan wilayah seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan fokus pembangunan menjadi bias dan tidak menyentuh permasalahan yang ada. Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian di Kabupaten Luwu Timur pada masa kini dan mendatang.

Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan informasi terkait perencanaan pengembangan wilayah dengan memperhatikan keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain melalui peningkatan peranan dan sumbangannya dalam perekonomian, juga harus dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dengan sektor-sektor lain dalam internal wilayah. Keterkaitan sektor pertambangan harus ditingkatkan agar mampu menarik sektor-sektor di hulunya (sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang) dan menarik sektor-sektor di hilirnya (sektor yang memiliki keterkaitan ke depan). Semakin kuat keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor-sektor utama lainnya seperti bangunan/konstruksi, maka akan makin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peranan sektor pertambangan (pertambangan non migas dan penggalian) terhadap perekonomian wilayah dan keterkaitannya dengan sektor-sektor lain di Kabupaten Luwu Timur

## **METODE**

Data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan utama kegiatan analisis adalah Tabel I-O Tahun 2009 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2012 dan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2012. Sumber data berasal dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan BPS Kabupaten Luwu Timur. Alat Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yaitu *microsoft 10* dan *GAMS* Perangkat keras yaitu Laptop Asus

N46V. Metode penelitian yang digunakan adalah metode identifikasi sektor-sektor perekonomian kabupaten luwu timur dan metode RAS. Analisis yang digunakan yaitu Analisis PDRB dan analisis *Input-Output (I-O)*.

Analisis PDRB secara teknis dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi atas harga konstanta serta struktur ekonomi harga berlaku dan atas harga konstanta tahun 2004-2012 Kabupaten Luwu Timur. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan keluaran dalam suatu perekonomian wilayah. Struktur perekonomian wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.

Analisis *I-O* digunakan untuk mengidentifikasi sektor strategis pada perekonomian Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data yang diturunkan dari tabel I-O Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis dilakukan mengacu pada tabel I-O Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 dengan 112 sektor perekonomian (112X112) yang di-*update* ke tahun 2012, kemudian diturunkan ke level kabupaten sehingga diperoleh tabel *I-O* Kabupaten Luwu Timur dengan 22 sektor (22x22) yaitu sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan tanpa migas, penggalian, industri non migas, listrik, air bersih, bangunan/ konstruksi, perdagangan, restoran, hotel, pengangkutan, komunikasi, bank, lembaga keuangan tanpa bank, usaha sewa bangunan, jasa perusahaan, pemerintahan umum, dan swasta.

Asumsi yang digunakan dalam penurunan Tabel *I-O* dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten adalah terdapat kemiri-

pan struktur ekonomi. Metode yang digunakan adalah dengan metode RAS. Tahapan metode RAS dapat dilihat pada Gambar 1.

Metode RAS merupakan suatu metode untuk memperkirakan matriks koefisien input yang baru pada tahun  $t$  "A(t)" dengan menggunakan informasi koefisien input tahun dasar "A(0)", total permintaan tahun antara  $t$ , dan total input antara tahun  $t$ . Secara matematis metode RAS dapat diuraikan sebagai berikut: Andaikan matriks koefisien input pada tahun dasar proyeksi adalah  $A(0) = \{a_{ij}(0)\}$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$ , matriks koefisien input untuk tahun proyeksi  $t$  diperkirakan dengan rumus  $A(t) = R A(0) S$ , di mana

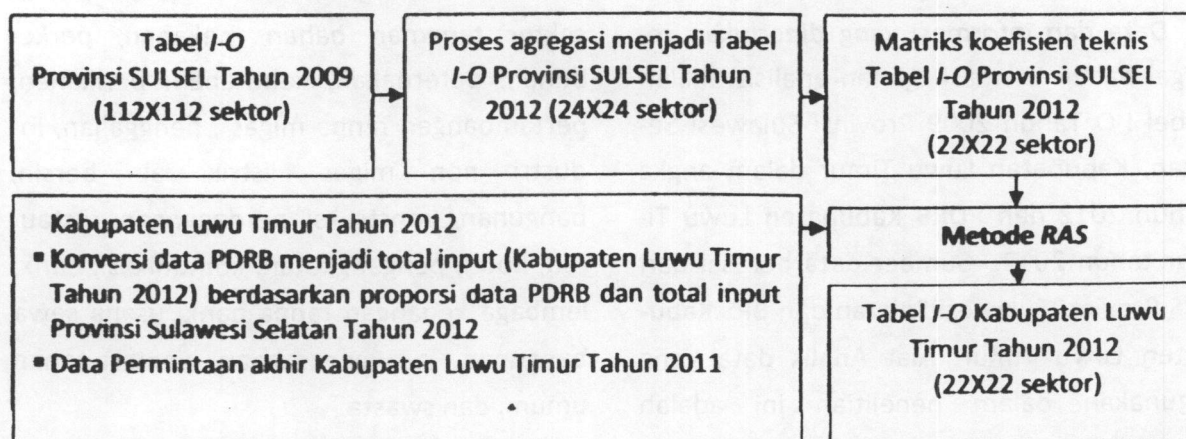
$R$  = matriks diagonal yang elemen-elemennya menunjukkan pengaruh substitusi, dan  $S$  = matriks diagonal yang elemen-elemennya menunjukkan pengaruh fabrikasi. Parameter teknis yang dapat diperoleh melalui analisis I-O adalah keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage/DBLj*), keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage/DFLi*), keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*indirect backward linkage/DIBLj*), daya sebar ke

belakang atau indeks daya penyebaran/IDP (*backward linkages effect ratio*), keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (*indirect forward linkage/DFLi*), indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja (*forward linkages effect ratio*) dan *Multiplier (output multiplier/OM, total value added multiplier/VM atau PDRB multiplier dan Income multiplier/IM)*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Sektor pertambangan (sub-sektor pertambangan tanpa migas dan sub-sektor penggalian) bagi perekonomian wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat diketahui melalui analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan analisis I-O. Analisis PDRB digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur tahun 2009-2012 sedangkan analisis I-O digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor dan *multiplier effect*.

Kontribusi PDRB lima sektor teratas di Kabupaten Luwu Timur mencapai 92.43% dari total PDRB. Lima sektor penyumbang PDRB tertinggi berturut-turut adalah (1) Pertambangan Tanpa Migas (75.83%), (2) Tanaman Perkebunan (9.34%), (3) Tanaman



Gambar 1. Tahapan Metode RAS

Tabel 1. PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012

No.	Lapangan Usaha / Sektor Perekonomian	Nilai (Juta Rupiah)	(%)
1	<b>Pertambangan Tanpa Migas</b>	<b>3,610,577.65</b>	<b>75.83</b>
2	Tanaman Perkebunan	444,510.18	9.34
3	Tanaman Bahan Makanan	158,074.10	3.32
4	Industri Non Migas	100,926.27	2.12
5	Perikanan	87,081.81	1.83
6	Perdagangan	80,549.37	1.69
7	Pemerintahan Umum	72,184.23	1.52
8	Usaha Sewa Bangunan	46,503.92	0.98
9	Pengangkutan	41,517.45	0.87
10	Bank	26,516.54	0.56
11	Bangunan/Konstruksi	24,633.13	0.52
12	Kehutanan	21,352.54	0.45
13	Peternakan	18,662.85	0.39
14	Listrik	10,546.25	0.22
15	Restauran	6,034.19	0.13
16	Lembaga Keuangan Tanpa Bank	3,431.02	0.07
17	<b>Penggalian</b>	<b>3,344.68</b>	<b>0.07</b>
18	Swasta	2,520.59	0.05
19	Komunikasi	1,699.76	0.04
20	Hotel	511.06	0.01
21	Jasa Perusahaan	122.80	0.00
22	Air Bersih	76.13	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>4,761,376.52</b>	<b>100,00</b>

Bahan Makanan (3.32%), (4) Industri Non Migas (2.12%) dan (5) Perikanan (1.83%) (Lihat Tabel 1).

Tren perubahan struktur ekonomi Kabupaten Luwu Timur antara tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2008-2012 sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut, sektor pertambangan tanpa migas memiliki tingkat pertumbuhan PDRB rata-rata sebesar 78.28 % (peringkat ke-1) dan sektor penggalian memiliki tingkat pertumbuhan PDRB rata-rata sebesar 0.06 % (peringkat ke-16).

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat dibandingkan bahwa sektor pertambangan

tanpa migas yang menempati peringkat pertama berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB tetap menempati peringkat pertama. Sedangkan sektor penggalian yang menempati peringkat ke-17 berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB menempati peringkat ke-16.

Tabel I-O Kabupaten Luwu Timur 2012 terdiri atas 22 sektor yaitu: (1) tanaman bahan makanan; (2) perkebunan; (3) peternakan, (4) kehutanan, (5) perikanan, (6) pertambangan tanpa migas, (7) penggalian, (8) industri non migas, (9) listrik, (10) air bersih, (11) bangunan/ konstruksi; (12) perdagangan, (13) restaurant, (14) hotel, (15) pengangkutan, (16) komunikasi, (17) bank, (18) lembaga keuangan tanpa bank,

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 (%)

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	Rerata
1	Pertambangan Tanpa Migas	80.46	78.06	79.94	76.95	75.83	78.25
2	Perkebunan	7.68	8.41	7.59	8.90	9.34	8.38
3	Tanaman Bahan Makanan	2.89	3.27	2.90	3.25	3.32	3.13
4	Industri Non Migas	1.85	2.02	1.83	2.07	2.12	1.98
5	Perikanan	1.37	1.62	1.48	1.71	1.83	1.60
6	Perdagangan	1.24	1.50	1.40	1.58	1.69	1.48
7	Pemerintahan Umum	1.27	1.44	1.36	1.50	1.52	1.42
8	Usaha Sewa Bangunan	0.68	0.79	0.76	0.91	0.98	0.82
9	Pengangkutan	0.63	0.74	0.71	0.83	0.87	0.76
10	Kehutanan	0.45	0.47	0.43	0.47	0.45	0.45
11	Bangunan/Konstruksi	0.35	0.43	0.41	0.45	0.52	0.43
12	Peternakan	0.38	0.40	0.36	0.41	0.39	0.39
13	Bank	0.33	0.37	0.37	0.46	0.56	0.42
14	Listrik	0.15	0.17	0.16	0.19	0.22	0.18
15	Restauran	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11
16	Penggalian	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06
17	Lembaga Keuangan Tanpa bank	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06
18	Swasta	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
19	Komunikasi	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03
20	Hotel	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
21	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Air Bersih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rata-rata	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76

(19) usaha sewa bangunan, (20) jasa perusahaan, (21) pemerintahan umum, dan (22) swasta. Tabel I-O Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran.

#### Keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage/DBLj*)

Keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage/DBLj*) yang menunjukkan efek permintaan suatu sektor terhadap perubahan tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung. Nilai  $DBL_j > 1$  menunjukkan bahwa sektor *j* memiliki keterkaitan ke belakang yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam memenuhi

turunan permintaan yang ditimbulkan oleh sektor. Nilai Keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage/DBLj*) yaitu: (1) bangunan/ konstruksi (0.8159), (2) peternakan (0.2994), (3) kehutanan (0.2433), (4) perdagangan (0.1210), (5) perkebunan (0.120), (6) industri non migas (0.1005), (7) pengangkutan (0.0770), (8) tanaman bahan makanan (0.0770), (9) bank (0.0581), (10) perikanan (0.0568), (11) listrik (0.0386), (12) ) usaha sewa bangunan (0.0187), (13) penggalian (0.0123), (14) lembaga keuangan tanpa bank (0.0117), (15) komunikasi (0.0106), (16) pertambangan tanpa migas (0.0090), (17) jasa perusahaan (0.0079), (18) hotel (0.0006), (19) air bersih

(0.0006), (20) restaurant (0.0006) (21) swasta (0.0000), dan (22) pemerintahan umum (0.0000).

#### Keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage/DFLi*)

Keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage/DFLi*) yang menunjukkan banyaknya output suatu sektor yang dipakai oleh sektor-sektor lain. Nilai Keterkaitan langsung. Nilai  $DFL_i^* > 1$  menunjukkan bahwa sektor  $i$  memiliki keterkaitan ke depan yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah. Nilai Keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage/DFLi*) yaitu: (1) industri non migas (0.5436), (2) pemerintahan umum (0.3979), (3) pengangkutan (0.2499), (4) perdagangan (0.2135), (5) tanaman bahan makanan (0.1939), (6) perikanan (0.1111), (7) peternakan (0.0684), (8) bank (0.0508), (9) usaha sewa bangunan (0.0441), (10) perkebunan (0.0426), (11) penggalian (0.0296), (12) pertambangan tanpa migas (0.0282), (13) restaurant (0.0275), (14) bangunan/ konstruksi (0.0155), (15) kehutanan (0.0079), (16) komunikasi (0.0060), (17) lembaga keuangan tanpa bank (0.0036), (18) hotel (0.0035), (19) listrik (0.0023), (20) jasa perusahaan (0.0017), (21) swasta (0.0017), dan (22) air bersih (0.0002).

Berdasarkan Nilai Keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage/DBLj*) dan Nilai Keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage/DFLi*), sektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai  $DBL_j$  sebesar 0,0090 yang lebih kecil dibandingkan nilai  $DFL_i$  sebesar 0,0282 dan sektor penggalian memiliki nilai  $DBL_j$  sebesar 0,0123 yang lebih kecil dibandingkan nilai

$DFL_i$  sebesar 0,0296. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan tanpa migas dan sektor penggalian lebih sedikit menggunakan *output* dari sektor lain untuk digunakan sebagai *input* sektornya sendiri dibandingkan menghasilkan *output* yang dapat digunakan oleh sektor lain sebagai *input* secara langsung. Dengan kata lain bahwa sektor pertambangan tanpa migas dan sektor penggalian merupakan sektor yang menggunakan *input* antara lebih kecil, dibandingkan *total output* antara untuk memenuhi seluruh permintaan.

#### Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*indirect backward linkage/DIBLj*)

Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*indirect backward linkage/DIBLj*) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung dari kenaikan permintaan akhir satu unit sektor tertentu yang dapat meningkatkan *total output* seluruh sektor perekonomian. Nilai Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*indirect backward linkage/DIBLj*) yaitu: (1) bangunan/ konstruksi (1.8888), (2) kehutanan (1.268) (3) peternakan (1.343), (4) perdagangan (1.126), (5) perkebunan (1.113), (6) industri non migas (1.100), (7) tanaman bahan makanan (1.084), (8) pengangkutan (1.078), (9) bank (1.062), (10) perikanan (1.060), (11) listrik (1.039), (12) penggalian (1.013) (13) lembaga keuangan tanpa bank (1.012), (14) komunikasi (1.011) (15) pertambangan tanpa migas (1.009), (16) jasa perusahaan (1.008), (17) usaha sewa bangunan (1.002), (18) hotel (1.001), (19) air bersih (1.000), (20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000).



Berdasarkan nilai Nilai Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*indirect backward linkage/DIBLj*), sektor pertambangan (subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian) sebaran nilai *DIBL* seluruh sektor perekonomian memiliki nilai  $\geq 1$ . Sektor yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi dengan nilai 1,89. Sektor penggalian menempati peringkat ke-12 nilai 1.013 dan sektor pertambangan tanpa migas menempati peringkat ke-15 dari seluruh sektor perekonomian dengan nilai 1.009.

#### **Daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran/IDP (*backward linkages effect ratio*)**

Daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran/IDP (*backward linkages effect ratio*) yang menunjukkan kekuatan relatif permintaan akhir suatu sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian. Besaran nilai *IDPj* dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Bila  $IDP_j=1$ , hal tersebut berarti bahwa daya penyebaran sektor *j* sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai  $IDP_j>1$  menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor *j* berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya  $IDP_j<1$  menunjukkan daya penyebaran sektor *j* lebih rendah dari rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai daya sebar ke belakang atau indeks daya penyebaran/IDP (*backward linkages effect ratio*) yaitu: (1) bangunan/konstruksi (1.715), (2) peternakan (1.220), (3) kehutanan (1.1152) (4) perdagangan

(1.023), (5) perkebunan (1.011), (6) industri non migas (1.000), (7) tanaman bahan makanan (0.985), (8) pengangkutan (0.980), (9) bank (0.965), (10) perikanan (0.963), (11) listrik (0.944), (12) komunikasi (0.918), (13) penggalian (0.921), (14) lembaga keuangan tanpa bank (0.919), (15) pertambangan tanpa migas (0.917), (16) jasa perusahaan (0.916), (17) usaha sewa bangunan (0.910), (18) hotel (0.909), (19) air bersih (0.909), (20) restaurant (0.909) (21) swasta (0.909), dan (22) pemerintahan umum (0.909).

Berdasarkan nilai Indeks Daya Penyebaran (IDP) yang bernilai kurang dari satu dikelompokkan sebagai sektor yang kurang mampu menarik sektor-sektor hulunya. Sektor penggalian memiliki nilai IDP sebesar 0.921 urutan ke-13 dan sektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai IDP sebesar 0.917 urutan ke-15, artinya setiap kenaikan 1 unit output sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas hanya mengakibatkan penggunaan sektor-sektor lain sebagai input sebesar 0.921 unit untuk sektor penggalian dan 0.917 unit untuk sektor pertambangan tanpa migas.

#### **Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (*indirect forward linkage/DIFLI*)**

Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (*indirect forward linkage/DIFLI*), yaitu peranan suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir dari seluruh sektor perekonomian. Nilai Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (*indirect forward linkage/DIFLI*) yaitu: (1) industri non migas (1.556), (2) pemerintahan umum (1.486), (3) pengangkutan (1.267), (4) perdagangan (1.222), (5) tanaman bahan makanan (1.215), (6) perikanan (1.115), (7)

peternakan (1.073), (8) usaha sewa bangunan (1.053) (9) bank (1.053), (10) perkebunan (1.044), (11) penggalian (1.030), (12) pertambangan tanpa migas (1.028), (13) restaurant (1.028), (14) bangunan/ konstruksi (1.016), (15) kehutanan (1.008), (16) komunikasi (1.007), (17) lembaga keuangan tanpa bank (1.004), (18) hotel (1.004), (19) listrik (1.002), (20) jasa perusahaan (1.002), (21) swasta (1.002), dan (22) air bersih (1.000).

Berdasarkan nilai keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan atau *Direct Indirect Forward Linkage* (DIFL) menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan output sektor tersebut secara langsung dan tidak langsung per unit kenaikan permintaan akhir. Angka DIFL tertinggi ditempati sektor industri non migas dengan nilai 1.556. Sektor penggalian memiliki nilai DIFL sebesar 1.030 urutan ke-11 dan sektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai DIFL sebesar 1.028 urutan ke-12 dari seluruh sektor perekonomian.

#### **Indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja (*forward linkages effect ratio*)**

Indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja (*forward linkages effect ratio*) menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian. Nilai  $IDK_i > 1$  menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor  $i$  lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi, dan sebaliknya  $IDK_i < 1$  menunjukkan derajat kepekaan sektor  $i$  lebih

rendah dari rata-rata seluruh sektor ekonomi. Nilai Indeks derajat kepekaan/IDK atau sering disebut derajat kepekaan saja (*forward linkages effect ratio*) yaitu: (1) industri non migas (1.414), (2) pemerintahan umum (1.350), (3) pengangkutan (1.151), (4) perdagangan (1.111), (5) tanaman bahan makanan (1.104), (6) perikanan (1.013), (7) peternakan (0.975), (8) usaha sewa bangunan (0.956), (9) bank (0.956), (10) perkebunan (0.949), (11) penggalian (0.936), (12) pertambangan tanpa migas (0.934), (13) restaurant (0.934), (14) bangunan/ konstruksi (0.923), (15) kehutanan (0.916) (16) komunikasi (0.914) (17) hotel (0.912), (18) lembaga keuangan tanpa bank (0.912), (19) listrik (0.911), (20) jasa perusahaan (0.910), (21) swasta (0.910), dan (22) air bersih (0.909).

Sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas memiliki Indeks Derajat Kepekaan (IDK) kurang dari satu (0.936 dan 0.943). Hal ini berarti kenaikan 1 unit permintaan akhir sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas akan menyebabkan naiknya *output* sektor-sektor lain termasuk sektornya sendiri secara keseluruhan sebesar 0.936 untuk sektor penggalian dan 0,943 unit untuk sektor pertambangan tanpa migas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas kurang memiliki kemampuan untuk mendorong sektor-sektor hilir yang menggunakan *outputnya* sebagai *input* produksi. Oleh karena itu, sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas tidak akan mudah terpengaruh bila terjadi perubahan pada sektor-sektor yang menggunakan *output* sektor penggalian dan

Tabel 3. Pengelompokan Sektor Perekonomian di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Nilai IDP dan IDK

		IDP>1	IDP<1
IDK>1	I	12. Perdagangan 08. Industri Non Migas	III Tanaman Bahan Makanan Perikanan 15. Pengangkutan 21. Pemerintahan Umum
	II	2. Perkebunan 3. Peternakan 4. Kehutanan 9. Peternakan 11. Bangunan/Konstruksi	IV 6. Pertambangan Tanpa Migas 7. Tanaman Perkebunan 9. Penggalian 10. Air Bersih 13. Restoran 14. Hotel 16. Komunikasi 17. Bank 18. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 19. Usaha Sewa Bangunan 20. Jasa Perusahaan 22. Swasta
IDK<1			

sektor pertambangan tanpa migas sebagai *input* produksinya.

Nilai *DIFL* sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas lebih tinggi dari nilai *DIBL*-nya, hal ini berarti bahwa *output* sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas lebih sedikit menggunakan *output* dari sektor lain dibandingkan digunakan sebagai *input* langsung maupun tidak langsung pada sektor lain. Nilai *DBL* dan *DIBL* sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas yang rendah menunjukkan bahwa sektor tersebut menggunakan *input* dari sektor-sektor lain dengan jumlah yang rendah.

Berdasarkan hasil analisis IDP dan IDK, kelompok IDP dan IDK sektor-sektor perekonomian dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP dan IDK di atas rata-rata (>1). Kelompok II adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP di atas rata-rata (>1)

dan IDK di bawah rata-rata (<1). Kelompok III adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP di bawah rata-rata (<1) dan IDK di atas rata-rata (>1). Kelompok IV adalah sektor-sektor yang mempunyai IDP dan IDK di bawah rata-rata (<1).

Dari hasil analisis, sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas menempati kuadran ke-4 dalam pengelompokan tersebut, karena memiliki nilai IDP dan IDK kurang dari satu. Pengelompokan sektor-sektor perekonomian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan nilai IDP dan IDK dapat dilihat pada Tabel 3.

Sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas. Sektor penggalian memiliki keterkaitan ke depan dengan sektor bangunan/konstruksi (0,02934) sedangkan sektor pertambangan tanpa migas memiliki keterkaitan ke depan dengan sektor listrik (0,0281).

Sektor pertambangan tanpa migas memiliki keterkaitan ke belakang dengan sektor pemerintahan umum (0.01), sedangkan sektor penggalian memiliki keterkaitan ke belakang dengan sektor-sektor lain yaitu pengangkutan (0.0041), pemerintahan umum (0.0023). Usaha sewa bangunan (0.0017), perdagangan (0.0010), restoran (0.00092), bank (0.0006), Bangunan/Konstruksi (0.00057), industri non migas (0.00052), penggalian (0.00028), hotel (0.00004), komunikasi (0.00003), listrik (0.00002) dan kehutanan (0.00001).

Dari keseluruhan nilai  $DBL_i$ ,  $DFL_i$ ,  $IDP$  dan  $IDK$  yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi (nilai  $DBL_i$ ,  $DFL_i$ ,  $IDP$ ) dan sektor industri non migas (nilai  $DFL_i$ ,  $DIFL_i$ ,  $IDK$ ). Kontribusi sektor bangunan/konstruksi sebesar 0.55 % dari PDRB, sedangkan kontribusi sektor industri non migas sebesar 1.97 % dari nilai jumlah PDRB dan subsektor makanan, minuman dan tembakau sebesar 59.03% dari keseluruhan *output* sektor industri non migas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Sektor yang mempunyai  $IDP$  tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai pengaruh terhadap sektor lain, sebaliknya sektor yang mempunyai  $IDK$  yang tinggi berarti sektor tersebut akan cepat terpengaruh bila terjadi perubahan pada sektor lainnya subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian karena memiliki nilai  $IDP$  dan  $IDK$  kurang dari satu maka dapat diartikan bahwa subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sektor lain dan tidak cepat terpengaruh jika terjadi perubahan pada sektor lainnya.

Sektor-sektor yang memiliki koefisien keterkaitan ke belakang dan ke depan paling tinggi dapat dikatakan sebagai sektor-sektor yang memiliki basis domestik baik dari sisi *input* maupun *output*. Artinya sektor tersebut memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian regional domestik. Dari hasil pengelompokan sektor perekonomian berdasarkan nilai  $IDP$  dan  $IDK$  pada Tabel 31 dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kekuatan menggerakkan perekonomian Kabupaten Luwu Timur baik dari sisi hulu dan hilir adalah sektor industri non migas dan sektor perdagangan. Sektor industri non migas dan sektor perdagangan mempunyai  $IDP$  dan  $IDK$  tinggi. Sektor industri non migas yang merupakan sektor sekunder adalah sektor lanjutan dari penunjang sektor primer (*manufacture*) yang cenderung berkaitan pada sumber daya manusia, modal, teknologi dan bahan baku yang berasal dari sektor primer. Sektor ini meliputi lapangan usaha yang terdiri dari (a) makanan, minuman dan tembakau, (b) tekstil, pakaian jadi dan kulit, (c) kayu, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, (d) kertas dan barang dari kertas percetakan dan penerbitan, (e) pupuk, kimia dan barang dari karet, (f) semen dan barang galian bukan logam, (g) logam dasar besi dan baja, (h) alat angkut, mesin dan peralatannya, dan (i) barang lainnya. Dari keseluruhan lapangan usaha tersebut, yang paling besar adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 59.03%.

#### **Multiplier Effect**

*Multiplier* terbagi menjadi *multiplier* tipe I dan *multiplier* tipe II. *Multiplier* tipe I dihitung berdasarkan *inverse matriks leontief*  $(I-A)^{-1}$ , di mana sektor rumah tangga diperla-

Tabel 4. Kontribusi Sektor Industri Nonmigas Tahun 2012

No	Klasifikasi	Nilai (juta Rupiah)	%
1	Makanan, minuman dan tembakau	59 578.74	59.03
2	Tekstil, pakaian jadi dan kulit	153.59	0.15
3	Kayu, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya	28 559.61	28.30
4	Kertas dan barang dari kertas percetakan dan penerbitan	778.63	0.77
5	Pupuk, kimia dan barang dari karet	4 431.24	4.39
6	Semen dan barang galian bukan logam	3 785.49	3.75
7	Logam dasar besi dan baja	0	0.00
8	Alat angkut, mesin dan peralatannya	3 524.13	3.49
9	Barang lainnya	114.84	0.11
<b>Jumlah</b>		<b>100 926.27</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur

kukan secara *exogenous*, sedangkan multiplier tipe II tidak hanya menghitung dampak langsung dan tidak langsung, tetapi termasuk pula dampak induksi, yaitu dampak dari perubahan pola konsumsi rumah tangga akibat peningkatan terhadap kinerja sistem perekonomian wilayah. Analisis *multiplier effect* dari sektor-sektor perekonomian wilayah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Tabel I-O tahun 2012 terdiri atas *multiplier output*, nilai tambah bruto (NTB), dan pendapatan (*income*).

#### **Multiplier Effect Output (OM)**

Dalam model I-O, *output* memiliki hubungan timbal balik dengan permintaan akhir, artinya jumlah *output* yang dapat diproduksi tergantung jumlah permintaan akhirnya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, *output* justru yang menentukan besarnya permintaan akhir. Nilai *multiplier effect output* yaitu (1) bangunan/ konstruksi (1.888), (2) peternakan (1.343), (3) kehutanan (1.268), (4) perdagangan (1.126), (5) perkebunan (1.113), (6) industri non migas (1.100), (7) tanaman bahan makanan (1.084), (8) pengangkutan (1.078), (9) bank (1.062), (10) perikanan (1.060), (11) listrik

(1.039), (12) penggalian (1.013), (13) lembaga keuangan tanpa bank (1.012), (14) komunikasi (1.011), (15) pertambangan tanpa migas (1.009), (16) jasa perusahaan (1.008), (17) usaha sewa bangunan (1.002), (18) hotel (1.001), (19) air bersih (1.000), (20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000)

Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa sektor bangunan/konstruksi memiliki nilai *multiplier effect output* yang paling tinggi, diikuti oleh sektor peternakan serta sektor kehutanan pada urutan kedua dan ketiga. Sektor penggalian hanya menempati peringkat *multiplier effect output* ke-12 dengan nilai 1,013 dan sektor pertambangan tanpa migas peringkat ke -16 dari keseluruhan dengan nilai 1,009. Hal ini berarti apabila permintaan akhir sektor penggalian dan sektor pertambangan tanpa migas meningkat 1 miliar rupiah, maka dampak terhadap perekonomian wilayah (*output*) meningkat 1.013 dan 1.009 miliar rupiah. Dibandingkan sektor-sektor perekonomian yang termasuk dalam kelompok sektor pertambangan dan penggalian, multiplier effect output subsektor penggalian di atas subsektor pertambangan tanpa migas.

### **Multiplier Effect Nilai Tambah Bruto/VM**

Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah input primer yang merupakan bagian dari input secara keseluruhan. Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O, maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linier. Artinya peningkatan atau penurunan output akan diikuti secara proporsional oleh kenaikan dan penurunan NTB. Nilai Dampak sektor-sektor perekonomian terhadap NTB yaitu (1) bangunan/ konstruksi (5.430), (2) kehutanan (1.747), (3) peternakan (1.454), (4) perdagangan (1.138), (5) perkebunan (1.114), (6) industri non migas (1.112), (7) pengangkutan (1.083), (8) tanaman bahan makanan (1.083), (9) bank (1.062), (10) perikanan (1.060), (11) penggalian (1.012), (12) lembaga keuangan tanpa bank (1.012), (13) komunikasi (1.011), (14) listrik (1.040), (15) pertambangan tanpa migas (1.009), (16) jasa perusahaan (1.008), (17) usaha sewa bangunan (1.002), (18) hotel (1.001), (19) air bersih (1.000), (20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000)

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa sektor penggalian memiliki nilai dampak terhadap NTB sebesar 1.012 dan sektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai dampak terhadap NTB sebesar 1.009 yang berarti bahwa apabila permintaan akhir subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas meningkat 1 miliar rupiah, maka dampak terhadap NTB akan meningkat 1,012 miliar rupiah untuk sektor penggalian dan 1.009 miliar rupiah untuk sektor pertambangan tanpa migas. Sektor-sektor yang memiliki dampak NTB paling tinggi adalah

sektor bangunan/konstruksi (5.430) dan sektor kehutanan (1.747).

### **Multiplier Effect Pendapatan/IM**

Berdasarkan analisis *multiplier effect* terhadap pendapatan tipe I sektor-sektor perekonomian, diperoleh lima sektor yang memiliki nilai tertinggi, yaitu; sektor sewa bangunan/konstruksi, kehutanan, peternakan, industri non migas dan sektor pengangkutan. Subsektor penggalian memiliki nilai sebesar 1,013 menempati urutan ke-17 dan subsektor pertambangan tanpa migas memiliki nilai sebesar 1.031 menempati urutan ke-14. Hal ini berarti bahwa apabila permintaan akhir subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas meningkat 1 miliar rupiah, maka dampak terhadap pendapatan wilayah akan meningkat 1.013 miliar rupiah untuk subsektor penggalian dan 1.031 miliar rupiah untuk subsektor pertambangan tanpa migas. Nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor sewa bangunan/konstruksi, kehutanan, peternakan, dengan nilai masing-masing 5.406, 2.015; dan 1.507. Nilai *multiplier effect* pendapatan tipe I sektor-sektor perekonomian yaitu (1) bangunan/ konstruksi (5.406), (2) kehutanan (2.015), (3) peternakan (1.507), (4) industri non migas (1.356), (5) pengangkutan (1.293), (6) perdagangan (1.293), (7) bank (1.148), (8) perkebunan (1.132), (9) perikanan (1.131), (10) tanaman bahan makanan (1.106), (11) komunikasi (1.042), (12) usaha sewa bangunan (1.040), (13) listrik (1.039), (14) lembaga keuangan tanpa bank (1.033), (15) pertambangan tanpa migas (1.031), (16) jasa perusahaan (1.024), (17) penggalian (1.013), (18) hotel (1.002), (19) air bersih (1.000),

(20) restaurant (1.000) (21) swasta (1.000), dan (22) pemerintahan umum (1.000)

Berdasarkan seluruh indikator keterkaitan dan *multiplier effect* melalui analisis *I-O* diketahui bahwa subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas belum termasuk sektor strategis karena menurut Rustiadi et al. (2011) sektor strategis adalah sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang besar serta mampu menciptakan angka pengganda (*multiplier*) yang besar dalam perekonomian. Indikator tersebut kontradiktif dengan besarnya potensi dan sumbangan subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas yang dimiliki terhadap PDRB.

Keterkaitan subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas dengan sektor-sektor lain relatif rendah terutama dikarenakan output subsektor subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas lebih banyak digunakan untuk memenuhi permintaan akhir dibandingkan ditransaksikan antar sektor perekonomian dalam proses produksi. Dari *output total* subsektor subsektor penggalian sebesar Rp. 8,981.08 juta dan subsektor pertambangan tanpa migas sebesar Rp. 7,427,655.01 juta, permintaan antara subsektor penggalian sebesar 100% (Rp. 8,981.08 juta) dan subsektor pertambangan tanpa migas hanya sebesar 0.010% (Rp. 752.75 juta), sedangkan permintaan akhir (*final demand*) mencapai 99.99% (Rp. 7,426,902.26 juta) untuk subsektor pertambangan tanpa migas dan permintaan akhir (*final demand*) mencapai 100% (Rp. 8,981.08 juta) untuk subsektor penggalian. Dilihat dari komposisi permintaan akhir (*final demand*) subsektor

penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi (pembentukan modal tetap bruto) tidak memiliki permintaan akhir dari subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas. Perubahan stok memiliki permintaan akhir dari subsektor pertambangan tanpa migas mencapai 27.24% (Rp. 2,023,203.79 juta) sisanya adalah ekspor barang dan jasa 72.76% (Rp. 5,403,698.47 juta) sedangkan subsektor penggalian tidak memiliki perubahan stok dan ekspor barang dan jasa.

Dari sisi keterkaitan ke depan, subsektor pertambangan tanpa migas hanya terkait dengan 1 sektor, yaitu: sektor listrik. Dari sisi keterkaitan ke belakang, terkait hanya terkait dengan 1 sektor, yaitu: sektor pemerintahan umum.

Dari sisi keterkaitan ke depan, subsektor penggalian hanya terkait dengan 2 sektor, yaitu: subsektor penggalian itu sendiri dan bangunan/konstruksi. Dari sisi keterkaitan ke belakang terkait dengan 13 (duabelas) sektor, yaitu: kehutanan, penggalian, industri non migas, listrik, bangunan/ konstruksi, perdagangan, pengangkutan, hotel, restoran, konsumsi, bank, usaha sewa bangunan dan pemerintahan umum.

Berdasarkan analisis *I-O* secara umum sektor industri non migas dan sektor bangunan/konstruksi termasuk ke dalam sektor yang strategis karena memiliki nilai  $DBL^*$ ,  $DFL^*$ ,  $DIBL$ ,  $DIFL$ ,  $IDP$ ,  $IDK$ ,  $IM$ ,  $VM$  dan  $OM$  yang tinggi diatas sektor-sektor lainnya, sementara subsektor penggalian dan subsektor pertambangan tanpa migas belum termasuk kedalam sektor strategis.

Subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian yang merupakan bagian dari sektor primer (yang berbasis sumber daya alam) akan berkelanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi wilayah apabila memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor industri non migas. Hal ini sejalan dengan pendapat Rustiadi *et al.* (2011), roda perekonomian dapat bersinergi dengan baik dengan adanya keterkaitan. Makin kuat keterkaitan antar sektor, makin kecil ketergantungan sektor tersebut pada impor, sekaligus memperkecil kebocoran wilayah yang mengalir ke wilayah lainnya, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayahnya sendiri. Analisis keterkaitan antar sektor pada dasarnya melihat dampak *output* dan kenyataan bahwa sektor-sektor dalam perekonomian tersebut saling mempengaruhi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian sebagai salah satu subsektor strategis di Kabupaten Luwu Timur adalah meningkatkan keterkaitan subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian dengan sektor-sektor lain pada sektor hilirnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah produksi. Sektor industri non migas yang merupakan sektor sekunder yang cenderung berkaitan pada sumber daya manusia, modal, teknologi dan bahan baku yang berasal dari sektor primer. Dengan memiliki keterkaitan ke depan yang kuat terhadap sektor industri tanpa migas diharapkan subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian akan menjadi sektor strategis yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Luwu Timur.

## SIMPULAN

Sektor pertambangan memiliki peranan penting baik dalam PDRB maupun *output total* tapi memiliki hubungan keterkaitan antar sektor di bawah rata-rata. Nilai IDP dan IDK kurang dari satu menunjukkan Sektor pertambangan (subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian) belum mampu meningkatkan pertumbuhan sektor hulu dan hilirnya. Pembangunan Sektor pertambangan yang merupakan bagian dari sektor primer akan berkelanjutan dan berdampak besar terhadap ekonomi wilayah apabila memiliki keterkaitan kuat dengan sektor bangunan/konstruksi dan sektor industri non migas sebagai sektor sekunder yang merupakan penunjang sektor primer karena keseluruhan nilai DBLj, DIBLj, IDP, DFLi, DIFLi dan IDK yang tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi (nilai DBLj, DIBLj, IDP) dan sektor industri non migas (nilai DFLi, DIFLi, IDK).

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. (2011). *Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan..
- BPS. (2010). *Analisis Input Output Antar Sektor di Sulawesi Selatan Tahun 2009*. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- BPS. (2012). *Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2012*. Malili: BPS Kabupaten Luwu Timur.
- BPS. (2012). *Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2012*. Malili: BPS Kabupaten Luwu Timur.



- BPS. (2012). *PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012 se-Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS. (2012). *Produk Domestik Regional Bruto menurut penggunaan Sulawesi Selatan Tahun 2012*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS. (2012). *Produk Domestik Regional Bruto Per Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 2011*. Malili: BPS Kabupaten Luwu Timur.
- BPS. (2012). *Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Tahun 2012*. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- DESDM. (2012). *Izin Usaha Pertambangan Malili (ID): Sulawesi Selatan: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur*.
- Ditjen Banjamsos. (2010). *Buku Kerja Pendamping PKH*. Jakarta: Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Djakapermana RD. (2010). *Pengembangan wilayah melalui pendekatan Kesisteman*. Bogor: IPB Press.
- KKBP. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Marakarma, A.H. (2009). *Pengelolaan Danau Kaskade; Matano, Mahalona, Towuti (Kompleks Danau Malili)* wordpress, 13 Agustus. Diperoleh dari <http://menyelamatkandanaulimboto.wordpress.com/kndi-i/andi-hatta-marakarma/>.
- Panuju, D.R. & Rustiadi, E. (2012). *Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah*. [bahan kuliah]. Bagian Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rustiadi, E., Saefullah, S., & Panuju D.R. (2011). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Crestpent Press Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Syarief, H. (2014). "Analisis Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu". Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.